

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu mengenai “respons IMF dalam membantu Indonesia menghadapi resesi akibat pandemi Covid-19 2020-2021” dan penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan tema tersebut.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Irfa Ampri, Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, yang menulis artikel dengan judul “Peningkatan Kapasitas Pendanaan IMF Dalam Mengatasi Krisis Keuangan Global”, yang dimuat dalam jurnal *Arsitektur Keuangan Internasional* (2020). Beliau menemukan dampak dari krisis keuangan di Eropa dan upaya dan keterbatasan Uni Eropa dalam mengatasi krisis serta peran G20 dan revitalisasi peran IMF dalam penanganan krisis, dan berbagai opsi peningkatan keuangan IMF. Perbedaan artikel ini dengan penelitian yang akan ditulis terletak pada fokus permasalahan yang akan diteliti, yaitu lebih terfokus pada respons IMF (International Monetary Fund) dalam membantu Indonesia menghadapi resesi ekonomi akibat pandemi Covid-19 2020-2021 dengan konsep yang sama, yaitu melibatkan organisasi internasional yaitu IMF.

Kedua, Irma Indrayani dosen FISIP Universitas Negeri Jakarta, menulis artikel yang berjudul “International Monetary Fund (IMF) dan Penanggulangan Krisis Moneter di Indonesia (2017)” yang dimuat dalam *Jurnal dan Budaya* No. 4291. Irma menemukan beberapa peran IMF dalam menanggulangi krisis moneter di Indonesia dan juga keberadaan sistem moneter internasional tidak bisa dipisahkan dari politik internasional. Sistem moneter internasional selalu terkait dengan orde politik yang sedang berjalan dalam Hubungan Internasional. Perbedaan artikel ini dengan penelitian yang akan ditulis terletak pada fokus permasalahan yang akan diteliti, yaitu lebih terfokus pada respons IMF

(International Monetary Fund) dalam membantu Indonesia menghadapi resesi ekonomi akibat pandemi Covid-19 2020-2021 dengan konsep yang sama, yaitu melibatkan organisasi internasional yaitu IMF.

Ketiga, Bambang Ariyanto, Peneliti tetap di Research Center for Forensic Accounting, menulis artikel yang berjudul, “Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Perekonomian Dunia 2020”, yang di muat dalam Jurnal Ekonomi Perjuangan (JUMPER) Volume 2 No. 2 Tahun 2020. Ariyanto menemukan kebijakan IMF dan negara-negara di dunia dalam mengatasi perekonomian yang menurun akibat pandemic Covid-19 dengan melakukan taktis dengan menggulirkan stimulus ekonomi untuk memperkuat pelebagaan ekonomi setiap negara di dunia. Secara garis besar tulisan ini sangat berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan namun penelitian yang akan dibuat subjeknya lebih sempit yaitu hanya Indonesia. Perbedaan artikel ini dengan penelitian yang akan di tulis terletak pada fokus permasalahan yang akan di teliti, yaitu lebih terfokus pada respons IMF (International Monetary Fund) dalam membantu Indonesia menghadapi resesi ekonomi akibat pandemi Covid-19 2020-2021 dengan konsep yang sama, yaitu melibatkan organisasi internasional yaitu IMF

Keempat, Ach. Djuaeni. K, menulis artikel jurnal yang berjudul “Tantangan Penerapan Good Governance di Indonesia” yang di muat dalam Jurnal Inspirasi Volume 6 No. 2, September 2015 menemukan beberapa tantangan yang di hadapi IMF dalam memperbaiki manajemen pemerintahan dan pembangunan di negara-negara penerima bantuan, dalam hal ini Indonesia. Perbedaan artikel ini dengan penelitian yang akan di tulis terletak pada fokus permasalahan yang akan di teliti, yaitu lebih terfokus pada respons IMF (International Monetary Fund) dalam membantu Indonesia menghadapi resesi ekonomi akibat pandemi Covid-19 2020-2021 dengan konsep yang sama, yaitu melibatkan organisasi internasional yaitu IMF

Kelima, Yenti Sumarni, menulis artikel yang berjudul “Pandemi Covid-19: Tantangan Ekonomi dan Bisnis” yang di muat dalam Jurnal Al-Intaj Vol.6 No.2 September 2020. Yenti menemukan dampak Pandemi Covid-19 yang terjadi pada

perekonomian global termasuk perekonomian di Indonesia. Dari dampak pandemi ini penurunan permintaan produk-produk syariah dan terhambatnya produksi syariah karena bahan baku berasal dari negara luar, dampak pandemi ini mempengaruhi terhambatnya realisasi penanaman modal. Perbedaan artikel ini dengan penelitian yang akan ditulis terletak pada fokus permasalahan yang akan diteliti serta konsep yang berbeda. Perbedaan artikel ini dengan penelitian yang akan ditulis terletak pada fokus permasalahan yang akan diteliti, yaitu lebih terfokus pada respons IMF (International Monetary Fund) dalam membantu Indonesia menghadapi resesi ekonomi akibat pandemi Covid-19 2020-2021 dengan konsep yang sama, yaitu melibatkan organisasi internasional yaitu IMF.

## **2.2 Kerangka Pemikiran (Teori dan Konsep)**

Pada tulisan respons IMF (International Monetary Fund) dalam membantu Indonesia menghadapi resesi ekonomi akibat pandemi Covid-19 2020-2021, untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian ini penulis menggunakan Teori dan beberapa konsep atau pendekatan. Mengingat objek penelitian ini adalah Indonesia yang mengalami resesi ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang membutuhkan bantuan ataupun pertolongan IMF. Indonesia sebagai negara berkembang tentu tidak lepas dari bantuan IMF sebagai organisasi Internasional yang memiliki tugas membantu negara-negara anggota terutama negara-negara berkembang yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Dalam analisis ini terlihat jelas bahwa Indonesia sebagai negara berkembang memiliki ketergantungan terhadap IMF. Misi IMF sebagai organisasi internasional yang mengatur system keuangan serta memberikan pengawasan moneter kepada negara-negara yang dipinjaminya, tentu tidak selalu berjalan dengan mulus, oleh karena itu penulis akan menganalisis penelitian ini dengan teori ketergantungan (dependency) serta konsep organisasi internasional pada kasus ini adalah IMF dan konsep krisis ekonomi.

### 2.2.1. Teori ketergantungan (Dependencia Teory)

Teori ketergantungan atau teori Dependensi menjelaskan bagaimana ekonomi negara-negara terpinggirkan atau dunia ketiga sangat bergantung pada negara dunia pertama atau negara inti. Ketika keadaan periferal menjalin hubungan dengan keadaan inti, hubungan ini menciptakan ketergantungan. Negara bagian inti dapat berkembang secara mandiri. Pada saat yang sama, perkembangan negara-negara pinggiran sangat bergantung pada perkembangan negara-negara inti. Hal ini dapat berdampak positif atau negatif bagi perkembangan negara mereka. Menurut teori ketergantungan, status negara-negara yang terpinggirkan di bawah pengaruh ekonomi global merupakan sumber utama keterbelakangan mereka.<sup>16</sup>

Teori ini dipakai untuk memudahkan penulis dalam menjelaskan hubungan antara IMF dan Indonesia. Dimana Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki ketergantungan kepada IMF, sebagai system moneter dunia dimana yang memegang kendali atas IMF atau pemilik modal yang dominan adalah negara-negara inti. Teori dependensi pada umumnya memberikan gambaran mengenai analisa dialektis bahwa pada dasarnya ketergantungan yang terjadi antara suatu subsistem dengan subsistem lain yang dominan merupakan salah satu penentu dalam perkembangan atau perubahan sosial yang terjadi dalam suatu masyarakat. dalam teori ini, yang menjadi titik tolak ialah penyesuaian ekonomi terbelakang pada sistem-sistem dunia sedemikian rupa sehingga menyebabkan terjadinya penyerahan sumber-sumber penghasilan daerah-daerah pinggiran ke pusat atau mengakibatkan timbulnya berbagai macam hambatan mekanik yang menyebabkan perekonomian di daerah-daerah pinggiran itu tetap terbelakang atau berubah bentuknya.

Konsep ketergantungan memungkinkan kita untuk melihat situasi internal negara-negara tersebut sebagai bagian dari ekonomi dunia. Dalam tradisi Marxian, teori imperialisme dikembangkan sebagai studi tentang proses perluasan pusat-pusat imperialis dan dominasi dunia mereka. Di era gerakan revolusioner Dunia

---

<sup>16</sup> TONY SMITH, 'The Case of Dependency Theory', *The State and Development in the Third World*, 31.2 (2018), 25–66 <<https://doi.org/10.2307/j.ctt7zv88r.4>>.

Ketiga, kita harus mengembangkan teori hukum pembangunan internal di negara-negara yang menjadi sasaran ekspansi semacam itu dan diperintah oleh mereka. Langkah teoretis ini melampaui teori pembangunan yang berusaha menjelaskan keadaan negara-negara terbelakang sebagai akibat dari kelambanan atau kegagalan mereka mengadopsi pola-pola efisiensi yang menjadi ciri negara maju.

*Dependency Theory* pertama kali muncul di Amerika Latin. Awalnya, teori ini lebih merupakan jawaban atas kegagalan program yang dijalankan oleh ECLA (United Nations Economic Commission for Latin America) pada awal 1960-an. Badan tersebut didirikan untuk mempromosikan pembangunan ekonomi di negara-negara Amerika Latin dengan memperkenalkan percontohan teori modernisasi yang telah terbukti berhasil di Eropa. Teori ketergantungan juga berasal dari tanggapan ilmiah terhadap pandangan Marxis klasik tentang pembangunan baik di negara maju maupun negara berkembang. Aliran neo-Marxisme yang kemudian mendukung ketergantungan ini pada keberadaan teori. Teori ketergantungan adalah teori yang sering dikaitkan dengan Marxisme, yang menyatakan bahwa beberapa negara inti menggunakan beberapa negara yang lebih lemah untuk kemakmuran.

Tokoh utama dari teori Dependensi adalah Theotonio Dos Santos dan Andre Gunder Frank. Theotonio Dos Santos, mendefinisikan bahwa ketergantungan adalah hubungan relasional yang tidakimbang antara negara maju dan negara miskin dalam pembangunan di kedua kelompok negara tersebut. Dia menjelaskan bahwa kemajuan negara Dunia Ketiga hanyalah akibat dari ekspansi ekonomi negara maju dengan kapitalisme nya. Jika terjadi sesuatu negatif di negara maju, maka negara berkembang akan mendapat dampak negatifnya pula. Sedangkan jika hal negatif terjadi di negara berkembang, maka belum tentu negara maju akan menerima dampak tersebut. Sebuah hubungan yang tidakimbang. Artinya, positif-negatif dampak berkembang pembangunan di negara maju akan dapat membawa dampak pada negara.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Third World, 'Of the American Economic Association ( May , 1970 ) The American Economic Review Vol . 60 , No . 2', 60.1 (1970), 6.

Oswaldo Sunkel (1969)<sup>7</sup> mendefinisikan ketergantungan sebagai penjelasan tentang perkembangan ekonomi sebuah negara dalam hal berbagai pengaruh eksternal seperti politik, ekonomi, dan budaya terhadap kebijakan pembangunan nasional. Susanne Bodenheimer<sup>8</sup> mendefinisikan ketergantungan sebagai sebuah proses yang berkelanjutan. Lebih lanjut ia menyatakan bahwa Amerika Latin sekarang ini dan sejak abad ke-16 merupakan bagian dari sistem internasional yang didominasi oleh negara-negara yang sekarang berkembang. Keterbelakangan Latin adalah hasil dari serangkaian hubungan tertentu dengan sistem internasional.

Teori ketergantungan yang menekankan bahwa aspek eksternal dari pembangunan menjadi penting. Negara-negara yang ekonominya lebih kuat, bukan saja menghambat karena menang dalam bersaing, tetapi juga ikut campur dalam mengubah struktur sosial, politik, dan ekonomi Negara yang lebih lemah. Menurut Robert A Packenham Kekuatan teori ketergantungan: menekankan pada aspek internasional, mempersoalkan akibat dari politik luar negeri (industri terhadap pinggiran), mengaitkan perubahan internal negara pinggiran dengan politik luar negeri negara maju, mengaitkan antara analisis ekonomi dengan analisis politik, membahas antar kelas dalam negeri dan hubungan kelas antar-negara dalam konteks internasional.

Teori ketergantungan memakai pendekatan struktural karena itu teori ketergantungan dapat digolongkan kelompok teori struktural. Struktural sendiri memang berpangkal pada filsafat materialisme yang dikembangkan oleh Karl Marx, tetapi teori ketergantungan membantah Marx yang menyatakan bahwa kapitalisme akan menjadi cara produksi tunggal dan menciptakan proses maupun struktural masyarakat yang sama di semua negara yang ada di dunia.

*Depedency theory* menekankan hubungan yang ada di dalam masyarakat seperti struktur sosial, kultur, ekonomi, dan politik. Asumsi yang mendasari teori ini adalah keterbelakangan dan pembangunan merupakan konsep yang saling terkait. Istilah ketergantungan digunakan untuk memberi tekanan bahwa kemajuan di masyarakat pusat (negara maju) merupakan keterbelakangan di daerah peripheral (negara dunia ketiga) diakibatkan oleh proses sejarah yang

disengaja, seperti kerangka teori dari pemikiran Marx tentang eksploitasi. Bahwa penyebab negara-negara tertinggal adalah karena negara-negara maju. Teori ini melihat ketidakseimbangan dalam hubungan antara Negara Dunia Ketiga dengan Negara Dunia Pertama karena mereka akan selalu berusaha menjaga aliran surplus ekonomi dari negara pinggiran ke negara sentral. Sebagai hasilnya, Negara Dunia Ketiga menjadi miskin, terbelakang, dan kondisi politik ekonominya tidak stabil.<sup>18</sup>

### **2.2.2 Konsep Organisasi Internasional “International Monetary Fund” (IMF)**

Organisasi internasional (international organization) pada umumnya dipahami sebagai sebuah organisasi yang didirikan melalui perjanjian atau instrumen lain yang diatur oleh hukum internasional dan memiliki personalitas hukum internasional nya sendiri. Anggota organisasi internasional biasanya terdiri dari negara-negara, tetapi sering kali entitas lain juga dapat mengajukan permohonan untuk menjadi anggota. Organisasi internasional berfungsi sebagai lembaga yang menghubungkan urusan-urusan antarnegara, namun keberadaannya tidak dimaksudkan untuk menggantikan peranan dan kewenangan negara-negara di tingkat domestik maupun eksternal. Dengan kata lain, organisasi internasional bukan organisasi supranasional yang memiliki kewenangan di atas negara-negara.<sup>19</sup>

Jan Klabbers menunjukkan tiga karakteristik dari organisasi internasional. Pertama, organisasi internasional biasanya dibuat oleh negara-negara atau pihak-pihak yang ber-wenang mewakili negara. Kedua, organisasi internasional dibentuk melalui sarana sebuah perjanjian. Ketiga, organisasi internasional minimal harus memiliki sebuah organ yang mempunyai kehendak yang berbeda dari kehendak dari negara-negara anggotanya.

---

<sup>18</sup> Alethia Rabbani, 'Teori Ketergantungan (Dependency Theory)', *Sosiologi79*, 2020 <<https://www.sosiologi79.com/2020/07/teori-ketergantungan-dependency-theory.html>> [accessed 7 July 2020].

<sup>19</sup> Peu Gosh dalam buku Bakry. Hal.172-173

Untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai makna organisasi internasional, “Theodore Coulombis dan James WVolf” mendefinisikan organisasi internasional dalam tiga level berbeda, yaitu dari level tujuan, institusi, dan proses. Dari level tujuan, organisasi internasional dibentuk dalam rangka mencapai semua atau sebagian dari tujuan-tujuan sebagai berikut.

1. Pengaturan hubungan Internasional khususnya melalui teknik penyelesaian sengketa antarnegara-bangsa secara damai;
2. Meminimalisasi, atau setidaknya mengontrol, konflik-konflik (perang) internasional;
3. Mempromosikan kerja sama dan kegiatan pembangunan antarnegara untuk kepentingan sosial dan ekonomi wilayah-wilayah tertentu. atau kepentingan kemanusiaan pada umumnya;
4. pertahanan kolektif dari sekelompok negara-bangsa untuk menghadapi ancaman eksternal.

Dari level institusi, organisasi internasional dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu organisasi-organisasi antar pemerintah (IGO) dan organisasi-organisasi nonpemerintah (NGO). Dalam konteks ini, Cou loubis dan Wolfe berbeda dengan sejumlah pakar lain yang melihat organisasi internasional terbatas pada organisasi-organisasi yang dibentuk oleh pemerintah negara-negara (sementara NGO dibentuk tidak mengatasnamakan atau melibatkan negara-negara). Dalam level institusi, organisasi internasional juga didefinisikan dalam kerangka model pemerintahan dunia (world government) yang ideal dan heuristik yang kemungkinan akan dibuat suatu saat nanti. Seperti diketahui, selama berabad-abad telah dikembangkan banyak sekali rencana hukum dan kelembagaan yang membayangkan suatu transisi menuju pemerintahan dunia dari satu bentuk ke bentuk lainnya.

IMF merupakan Organisasi Internasional antar pemerintah (IGO). IMF adalah organisasi internasional yang memiliki lebih dari 180 anggota negara di



dunia. IMF adalah organisasi yang bergerak di sektor ekonomi yang dibentuk pada tahun 1944 dan didirikan pada 27 Desember 1945.<sup>20</sup>

IMF adalah forum bagi negara-negara yang ingin memperkuat kerja sama moneter, mendorong perdagangan internasional, memprioritaskan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mengurangi kemiskinan dunia, serta membutuhkan dana untuk pemulihan ekonomi. IMF membantu negara-negara dalam krisis dengan memberikan dukungan keuangan kepada negara-negara ini. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan ruang manuver di negara-negara krisis dalam menerapkan kebijakan penyesuaian.

IMF membantu negara-negara dalam krisis dengan memberikan dukungan keuangan kepada negara-negara ini. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan ruang manuver di negara-negara krisis dalam menerapkan kebijakan penyesuaian. Dibandingkan dengan Bank Dunia, pinjaman Bank Dunia lebih terfokus pada proyek-proyek untuk rencana pembangunan jangka panjang. IMF lebih fokus pada kebijakan yang akan diterapkan oleh negara-negara krisis yang mencari bantuan untuk menghidupkan kembali ekonomi mereka. IMF merupakan lembaga yang siap membantu anggota kelembagaannya, baik yang maju maupun yang sedang berkembang. Pada dasarnya, semua negara yang mengalami kesulitan dalam neraca pembayarannya diberikan kredit jangka pendek dan menengah. Dana Moneter Internasional menyediakan pembiayaan pencegahan untuk membantu, mencegah dan menjamin terhadap krisis.<sup>21</sup>

IMF memiliki 2.300 staf anggota, berbeda dengan Bank Dunia, IMF tidak memiliki afiliasi atau perwakilan-perwakilan pembantu. Sebagian besar staf anggota menempati markas besarnya yang berlokasi di Washington, selain itu ada tiga kantor yang lebih kecil yang dipertahankan keberadaannya di Paris, Genewa dan di PBB, New York. Staf anggota IMF terdiri dari para profesional terutama

---

<sup>20</sup> Rahmawaty Harmen, 'Analisis Peran IMF (International Monetary Fund) Dalam Privatisasi BUMN Di Indonesia: Studi Kasus Privatisasi PT . Indosat', 2011, 87.

<sup>21</sup> Irma Indrayani, 'International Monetary Fund (IMF) Dan Penanggulangan Krisis Moneter Di Indonesia', *J. Ilmu Dan Budaya*, 38.38 (2014), 4291–4310.

pakar- pakar ekonomi dan ahli-ahli keuangan. Ketatausahaan IMF secara langsung diatur melalui keinginan dari anggota para pemerintahan.

Jabatan ketua dari Badan Eksekutif ditunjuk dan diangkat melalui Dewan Gubernur untuk waktu 5 tahun begitu juga dengan Direktur Manajer IMF, dan mengepalai 2.300 staf yang handal. Apra staf sebagian besar termasuk ahli-ahli ekonomi, statistik, sarjana peneliti, sarjana yang berpengalaman dalam keuangan publik dan perpajakan, ahli-ahli bahasa, para penulis dan didukung oleh personil dari seluruh dunia. Seperempat dari mereka secara langsung berhubungan dengan keanggotaan dalam basis yuridiksi dan penempatan lainnya berhubungan dengan seluruh lembaga dalam suatu aktivitas fungsional.

Wilayah hukum operasi IMF meliputi 5 wilayah benua: Afrika, Asia, Eropa, Timor-Tengah dan sebagian wilayah Barat. wilayah fungsional tersebut khususnya termasuk: Legal, Bank Sentral (Central Banking), urusan perpajakan (Fiskal Affairs/FAD), Exchange and tread relations (ETR) dan departemen penelitian harta benda negara (Research and treasure's department). Sebagian staf lainnya mengisi bermacam-macam fungsi pendukung dan administrasi. Akhirnya, mereka semua adalah pembantu-pembantu masyarakat sipil internasional yang independen dan tidak mewakili kepentingan-kepentingan nasional.<sup>22</sup>

Keanggotaan IMF terbuka bagi setiap negara yang mempunyai kebijakan di dalam negerinya dan bersedia untuk mentaati perjanjian dan kewajiban-kewajibannya pada IMF. Sebagian besar dari negara-negara tersebut saat ini menjadi anggota IMF dan pada perhitungan akhir keanggotaan IMF, tercatat 182 negara. Para anggota dapat keluar dari lembaga dan pada saat yang sama dapat bergabung lagi secara sukarela.

---

<sup>22</sup> Harun Umar, *Perspektif Politik Internasional Penerapan Strategi Bantuan IMF Terhadap Indonesia*, ed. by Harun Umar (Jakarta Selatan: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS) Jl. Sawo Manila, No. 61. Pejaten. Pasar Minggu. Jakarta Selatan. 12520. Telphon : 021-78837310/021-7806700 (hunting). Ex. 172. Fax : 021-7802718 Email : bee\_bers@yahoo.com, 2022), iv.

Adanya negara yang bergabung dengan IMF sebagai anggota, negara tersebut mendapat keuntungan untuk bekerja sama dalam keberhasilan dan mendapat bantuan-bantuan dana. Hal ini termasuk perjanjian untuk mempertahankan kejelasan yang ada di dalam peraturan-peraturan untuk menentukan nilai dari mata uang dan hubungannya dengan nilai tukar mata uang negara-negara lain, untuk menahan diri dari pembatasan pertukaran nilai tukar untuk nilai tukar asing dan untuk mengejar arah kebijakan-kebijakan ekonomi yang akan disusun agar bermanfaat, bagi kedua belah pihak, baik kemakmuran nasional sendiri maupun kemakmuran seluruh anggota. IMF sebagai Lembaga sukarela, tidak memiliki kekuasaan untuk menggunakan kekerasan berkenaan dengan izin negara-negara anggota, secara substansi tekanan yang bersifat modal dapat mempertahankan dan memberi kedudukan IMF di dunia internasional.

Melalui sebagian besar anggotanya, IMF juga dapat menghapuskan suatu pelanggaran yang dilakukan anggota berkenaan dengan pemberian bantuan, atau memberhentikan anggota dari organisasi. Hal tersebut dapat terjadi setelah melalui kesimpulan yang telah diperhitungkan. Konsisten dengan cara alamiah sebagai organisasi dengan susunan organisasi secara wajar akan didapatkan anggota dalam hal terjadinya kekeliruan anggota dalam memenuhi perjanjian-perjanjian sebagai suatu upaya untuk mengatasi dan memperbaiki masalah- masalah dari berbagai faktor. Keadaan tersebut berlangsung di samping adanya pengawasan yang cepat terhadap anggota - anggotanya.

### **2.2.2.1 Peran Organisasi Internasional**

Peranan organisasi internasional dalam hubungan internasional saat ini telah diakui karena keberhasilannya dalam memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi suatu negara. Bahkan saat ini organisasi internasional dinilai dapat mempengaruhi tingkah laku negara secara tidak langsung. Kehadiran organisasi internasional mencerminkan kebutuhan manusia untuk bekerja sama, sekaligus sebagai sarana untuk menangani masalah-masalah yang timbul melalui kerja sama tersebut.

Organisasi Internasional tersebut akan menghimpun negara-negara di dunia dalam suatu sistem kerja sama yang dilengkapi dengan organ-organ yang dapat mencegah atau menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi.

Peranan organisasi internasional dapat dibagi dalam tiga kategori, yaitu:

1. Sebagai instrumen. Organisasi internasional digunakan oleh negara-negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik luar negerinya.
2. Sebagai arena. Organisasi internasional merupakan tempat membahas masalah-masalah yang dihadapi. Tidak jarang organisasi internasional digunakan oleh beberapa negara untuk mengangkat masalah dalam negerinya, ataupun masalah dalam negeri negara lain dengan tujuan untuk mendapatkan perhatian internasional.
3. Sebagai aktor independen. Organisasi internasional dapat membuat keputusan-keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau paksaan dari luar organisasi.

Menurut Clive Archer, secara umum fungsi organisasi internasional dapat dibagi kedalam sembilan fungsi, yaitu<sup>28</sup>:

1. Artikulasi dan agregasi: Organisasi Internasional berfungsi sebagai instrument bagi negara untuk mengartikulasikan dan mengagresikan kepentingannya, serta dapat mengartikulasikan kepentingannya sendiri. Organisasi Internasional menjadi salah satu bentuk kontak institusionalisme antara partisipan aktif dalam sistem internasional, yaitu sebagai forum diskusi dan negosiasi.
2. Norma: Organisasi Internasional sebagai aktor, forum dan instrument yang memberikan kontribusi yang berarti bagi aktivitas-aktivitas normatif dari sistem politik internasional. Misalnya dalam penetapan nilai-nilai atau prinsip-prinsip non-diskriminasi.

3. Rekrutmen: Organisasi Internasional menunjang fungsi penting untuk menarik atau merekrut partisipan dalam sistem politik internasional.
4. Sosialisasi: Upaya sistematis untuk mentransfer nilai-nilai kepada seluruh anggota sistem. Proses sosialisasi pada level internasional berlangsung pada tingkat nasional yang secara langsung mempengaruhi individu-individu atau kelompok-kelompok di dalam sejumlah negara dan di antaranya negara-negara yang bertindak pada lingkungan internasional atau diantara wakil mereka di dalam organisasi.
5. Pembuat peraturan: Sistem Internasional tidak mempunyai pemerintahan dunia, oleh karena itu, pembuatan keputusan internasional biasanya didasarkan pada praktek masa lalu, perjanjian *ad hoc*, atau oleh Organisasi Internasional.
6. Pelaksanaan peraturan: Pelaksanaan keputusan Organisasi Internasional hampir pasti diserahkan kepada kedaulatan negara. Dalam prakteknya, fungsi aplikasi aturan oleh organisasi Internasional seringkali lebih terbatas pada pengawasan pelaksanaannya, karena aplikasi sesungguhnya ada di tangan negara anggota. Fungsi pelaksanaan yang dilakukan oleh organisasi internasional terlihat pada apa yang dilakukan oleh IMF, yang membantu Indonesia untuk keluar dari krisis ekonomi. Dimana IMF hanya mengawasi pelaksanaan jalannya *Letter of Intent* oleh pemerintah Indonesia.
7. Pengesahan peraturan: Organisasi Internasional bertugas untuk mengesahkan aturan-aturan dalam sistem internasional.
8. Informasi: Organisasi Internasional melakukan pencarian, pengumpulan, pengolahan, dan penyebaran informasi.

9. Operasional: Organisasi Internasional menjalankan sejumlah fungsi operasional di banyak hal yang sama halnya seperti pemerintahan

### 2.2.3 Bagan Kerangka Pemikiran

*Bagan 2. 1 Bagan Kerangka Pemikiran*

